
**POTRET DAN STRATEGI PEMULIHAN EKONOMI INDONESIA AKIBAT
PANDEMI COVID-19 (2020 – 2021)**

Erni Setiawati¹, Andi Prasetyo²

^{1,2}Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Correspondent: ernisetiawati043@gmail.com

Abstract

Portrait and Strategy of Indonesia's Economic Recovery Due to the Covid-19 Pandemic (2020 – 2021). The purpose of the study is to determine and analyze Indonesia's macroeconomic portrait and recovery strategy due to the Covid-19 pandemic. The types and sources of data are secondary data for the period 2020 - 2021 sourced from publications by government institutions or authorized agencies related to research. The method and type of research is empirical social research with a qualitative descriptive approach method, namely research that is described, described and explained narratively using empirical and theoretical foundation analysis.

Data and information collection techniques use literature studies or literature studies (Library Research), by tracing important documents relevant to the object of research in the form of scientific articles, graphs, reports, journals, and journalistic reports. Stages in data analysis; First data reduction techniques, second data presentation, and third conclusion drawing / verification

The government allocates state budget funds for economic recovery of IDR 695.2 trillion in 2020. It is expected that in the third quarter the national economic recovery can be felt even though it has not grown positively, but at least not contracted as much as the second quarter. Then the national economy is expected to return to positive growth again in the fourth quarter.

For 2021, the Ministry of Finance (Kemenkeu) sets the budget ceiling for the national economic recovery program (PEN) at IDR 699.43 trillion. It is expected that the national economy will experience a significant recovery. Therefore, for these expectations to be realized, there must be synergy between fiscal and monetary policy holders and related institutions and implemented comprehensively. There are 3 (three) policies implemented to achieve this, namely: increasing domestic consumption, increasing business activity, and maintaining economic stability and monetary expansion.

Keywords: *macroeconomics, economic recovery strategy, covid-19 pandemic, PEN*

Abstrak

Potret dan Strategi Pemulihan Ekonomi Indonesia Akibat Pandemi Covid-19 (2020 – 2021). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis potret makroekonomi Indonesia dan strategi pemulihan akibat pandemi Covid-19. Jenis dan sumber data tersebut merupakan data sekunder periode 2020 – 2021 yang bersumber dari publikasi oleh lembaga pemerintah atau instansi berwenang yang terkait dengan penelitian. Metode dan jenis penelitiannya adalah penelitian sosial empiris dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dideskripsikan, dijelaskan dan dijelaskan secara naratif dengan menggunakan analisis landasan empiris dan teoritis.

Teknik pengumpulan data dan informasi menggunakan studi pustaka atau studi pustaka (Library Research), dengan menelusuri dokumen-dokumen penting yang relevan dengan objek penelitian berupa artikel ilmiah, grafik, laporan, jurnal, dan laporan jurnalistik. Tahapan dalam analisis data; Pertama teknik reduksi data, kedua penyajian data, dan ketiga penggambaran/verifikasi kesimpulan

Pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp 695,2 triliun pada

2020. Diharapkan pada triwulan III pemulihan ekonomi nasional dapat dirasakan meskipun belum tumbuh positif, namun setidaknya tidak berkontraksi sebanyak triwulan II. Kemudian perekonomian nasional diperkirakan akan kembali tumbuh positif lagi pada triwulan IV.

Untuk tahun 2021, Kementerian Keuangan (Kemkeu) menetapkan pagu anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 699,43 triliun. Perekonomian nasional diharapkan akan mengalami pemulihan yang signifikan. Oleh karena itu, agar harapan tersebut dapat terwujud, harus ada sinergi antara pemegang kebijakan fiskal dan moneter dengan lembaga terkait dan dilaksanakan secara komprehensif. Terdapat 3 (tiga) kebijakan yang ditempuh untuk mencapai hal tersebut, yaitu: meningkatkan konsumsi domestik, meningkatkan aktivitas usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter.

Kata Kunci: makroekonomi, strategi pemulihan ekonomi, pandemi covid-19, PEN

PENDAHULUAN

Genap setahun Indonesia didera pandemi Covid-19, tepatnya 2 Maret 2020 sejak pemerintah mengkonfirmasi kasus infeksi corona pertama kali. Secara umum, sepanjang tahun 2020 pandemi Covid-19 telah meluluhlantakkan segala aktivitas masyarakat, menciptakan krisis kesehatan, mengganggu aktivitas ekonomi, dan berdampak buruk pada ekonomi nasional juga ekonomi global. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk mencegah penularan yang lebih masiv, dengan menerapkan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 1 April 2020, namun keputusan pemerintah ini tidak mampu menurunkan angka kasus yang terinfeksi, bahkan berdampak luas pada kegiatan operasional baik dalam proses produksi, distribusi, konsumsi dan kegiatan-kegiatan lainnya, yang pada akhirnya roda ekonomi melemah, beberapa sektor usaha dan bisnis terpuruk, merugi bahkan bangkrut.

Pandemi mengakibatkan kinerja perekonomian terganggu. *Social distancing* yang diberlakukan oleh seluruh negara turut mengganggu pergerakan roda ekonomi global. Akibatnya, resesi menimpa beberapa negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang, termasuk negara Indonesia. Secara resmi Indonesia mengalami resesi ekonomi pada kuartal III tahun 2020, ditandai dengan produk domestik bruto (PDB) yang pertumbuhannya minus mencapai 3,49 persen (*year on year*).

Seperti yang disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyebutkan, ekonomi Indonesia pada kuartal II nilai PDB (atas dasar harga berlaku) sebesar Rp 3.894 triliun, untuk PDB (atas dasar harga konstan 2010) sebesar Rp 2.720,6 triliun. Semua komponen pengeluaran tahunan (*year on year*) berkontraksi. Penurunan paling dalam komponen konsumsi rumah tangga. Beberapa negara juga telah mengalami resesi, baik di Asia, Amerika bahkan Eropa turut mengalami resesi ekonomi.

Mengutip dari Express, pada Agustus 2020 pertumbuhan ekonomi Perancis berkontraksi hingga minus 13.8 persen. perekonomian Jerman menyusut mencapai 10.1 persen, AS dan Jepang menyusut hingga 7.6 persen, lalu Italia mengalami kontraksi minus 12.4 persen, kemudian Kanada minus 12.0 persen. Negara paling parah adalah Inggris yang mengalami resesi hingga minus 20 persen. Secara umum pertumbuhan rata-rata zona euro minus 7.3 persen. Untuk China, yang merupakan negara pertama terkonfirmasi sebagai awal mula munculnya wabah Covid-19 juga mengalami kemerosotan ekonomi diawal 3 bulan pertama 2020. Namun sejak April hingga Juni China telah mulai pulih dan mengalami pertumbuhan ekonomi (PDB) yang positif sebesar 2.5 persen (data yang dirilis pada Juli 2020).

Dampak lain dari pandemi Covid-19 yang dirasakan sangat merugikan dan dirasakan oleh banyak negara di seluruh dunia adalah terjadinya gelombang PHK besar-besaran dan akibatnya melonjaknya angka pengangguran. Negara maju seperti Amerika Serikat saja turut

mengalami lonjakan gelombang PHK tersebut. Sejak awal pandemi sekitar 30 juta orang diPHK dan kehilangan pekerjaannya di AS.

Salah satu sektor usaha yang juga paling banyak merasakan dampak buruk dari pandemi Covid-19 adalah industri sektor pariwisata. Hotel-hotel, tempat-tempat wisata, rumah makan, restoran-restoran, jasa *travelling*, maskapai penerbangan, jasa transportasi, banyak yang gulung tikar. Banyak usaha yang melakukan pengurangan dan PHK terhadap karyawannya. Contoh maskapai penerbangan Garuda Indonesia, akibat pandemi sehingga mengalami penurunan pendapatannya. Garuda Indonesia pada bulan Oktober 2020 mengumumkan memutuskan dan mengakhiri kontrak 700 pekerjanya. Pun yang terjadi dengan American Airlines juga melakukan PHK 19.000 karyawannya. Bahkan maskapai penerbangan AirAsia melalui anak perusahaan AirAsia Ikhlas Com Travel Sdn Bhd Kuala Lumpur Malaysia, untuk tetap bisa bertahan di tengah pandemi, melakukan menjual kambing aqiqah sebagai bentuk ekspansi bisnisnya. Begitu pula dengan Maskapai penerbangan Thai Airways, di luar catering penerbangannya, mencoba merambah bisnis kuliner dengan cara memproduksi dan menjual gorengan yang diberi nama *patong-go*. Penjualan dilakukan dengan menyewa berbagai lokasi strategis dan memanfaatkan aset properti kantor di berbagai sudut kantor untuk berjualan.

Pada bulan Oktober 2020, *World Health Organization* (WHO) bersama *Food and Agriculture Organization* (FAO), *International Labour Organization* (ILO), dan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) menyatakan dampak pandemi Covid-19 terjadi disrupsi sosial ekonomi. Kemiskinan bertambah di seluruh dunia, puluhan juta orang jatuh miskin, 690 juta orang mengalami kurang gizi dan menjadi 132 juta di akhir tahun 2020. Sektor informal menghadapi pukulan berat. Jutaan petani kehilangan penghasilan. Setengah dari 3.3 miliar para pekerja di dunia mengalami kehilangan pekerjaan dan risiko kekurangan uang, termasuk juga para pekerja migran.

Pertengahan Desember 2020 yang lalu *Asian Development Bank* (ADB) menyampaikan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di Asia mengalami kontraksi 0.4 persen di tahun 2020. Kemiskinan trend nya akan berbalik arah, di mana 3 – 4 tahun terakhir mulai turun, di tahun 2020 mengalami peningkatan. Disebutkan juga terjadi penurunan permintaan, rendahnya harga minyak dunia, dan hal ini membuat inflasi di Asia tahun 2020 jadi 2.8 persen dan diprediksi inflasi tahun 2021 sebesar 1.9 persen.

Disampaikan juga, GDP Malaysia turun menjadi 6 persen. Filipina berkontraksi sebesar 10 persen periode Januari hingga September 2020. Pada periode yang sama, Singapura juga mengalami kontraksi ekonomi 6.5 persen. Vietnam ternyata mengalami pertumbuhan ekonomi hanya 0.4 persen di kuartal II tahun 2020.

Pada rentang waktu 10 sampai 31 Juli 2020, LIPI melalui Pusat Penelitian Ekonomi melakukan survei online . LIPI berhasil menjangkit 1.548 rumah tangga yang tersebar di 32 provinsi. Responden berstatus Rumah Tangga Pekerja yaitu, 79,7 persen dan selebihnya pada Rumah Tangga Usaha dengan komposisi 20,3 persen. Hasil survei menunjukkan akibat pandemi Covid-19 dampak yang merugikan sangat dirasakan oleh rumah tangga. Rumah tangga merupakan pelaku ekonomi terkecil dan terpenting, semua kegiatan ekonomi berawal dari sana. Rumah tangga menjadi penopang utama perekonomian. Konsumsi rumah tangga, secara signifikan melambat karena adanya kontraksi pendapatan, dan akhirnya memengaruhi kinerja industri dan UMKM. Terjadi kontraksi pendapatan karena adanya PHK, pemotongan gaji, dan penurunan laba usaha. Lalu dampak lainnya adanya keterbatasan ruang konsumsi karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat.

Dari sektor fiskal, memperingati Hari Pajak 2020, Suryo Utomo Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan tiga dampak besar pandemi Covid-19 hingga menyebabkan krisis perekonomian Indonesia; yaitu:

- 1) Menurunnya tingkat konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat yang menopang 60 persen perekonomian. Konsumsi rumah tangga turun pada tahun 2019 dari 5.02 persen menjadi 2.84 persen pada tahun 2020.
- 2) Melemahnya investasi karena ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga berimplikasi pada terhentinya usaha.
- 3) Dunia mengalami kelesuan dan pelemahan ekonomi, akibatnya harga-harga komoditas turun, nilai ekspor juga ikut turun karena ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti.

Gejolak ekonomi juga berimplikasi pada penerimaan pajak tahun 2020 yang hanya mencapai Rp513,65 triliun atau 44.02 persen dari target sebesar Rp. 1,198.8 triliun berdasarkan Perpres 72 Tahun 2020. Pelemahan usaha dan perlambatan pertumbuhan ekonomi 2020 berdampak juga pada penerimaan pajak. Pandemi Covid-19 menjadi momen yang bersejarah karena berdampak pada pengelolaan keuangan negara hingga dilakukan perubahan APBN sebanyak dua kali dan upaya pemulihan ekonomi nasional.

Berdasarkan fakta-fakta, data-data dan fenomena-fenomena yang diuraikan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, dan karena itu peneliti mengangkat judul dalam penelitian ini, yaitu “Potret dan Strategi Pemulihan Ekonomi Indonesia Akibat Pandemi Covid-19 Tahun 2020 – 2021”

TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II dan kuartal III tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang negatif, yakni minus 3.49 persen di kuartal II dan minus 5.32 di kuartal III. Hal ini menandakan Indonesia telah pada posisi atau kondisi resesi ekonomi, karena dua kali berturut-turut kinerja pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi.

Menurut Ekonom Bhima Yudhistira (2020) dari *Institute for Development of Economics and Finance (Indef)*, menjelaskan bahwa krisis ekonomi berbeda dengan konsep resesi. Jika terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi dalam dua kuartal berturut-turut maka hal itu disebut resesi. Lembaga penelitian *National Bureau of Economic Research (NBER)*, sebuah lembaga penelitian yang berada di AS, mendefinisikan bahwa resesi adalah suatu kondisi terjadinya kontraksi pendapatan yang mengindikasikan turunnya daya beli masyarakat secara umum, dan tingkat pengangguran semakin tinggi. Sedangkan definisi krisis ekonomi adalah suatu kondisi dimana beberapa indikator ekonomi secara makro mengalami penurunan, misalnya jika terjadi krisis finansial, maka indikator-indikator sektor keuangan mengalami penurunan, seperti: turunnya nilai tukar rupiah, kredit macet, bahkan kinerja perbankan ikut melemah. Jika resesi ekonomi perlu dua kuartal berturut-turut terjadi kontraksi, untuk krisis ekonomi, cukup satu kuartal negatif juga bisa dikategorikan sebagai krisis. Bima (2020) menambahkan bahwa dampak yang diakibatkan oleh resesi ekonomi bisa lebih luas dan besar dibanding krisis ekonomi. Selain itu, dari sisi waktu resesi lebih panjang durasinya dari pada krisis ekonomi.

Ekonom Julius Shiskin (2020) yang dikutip oleh Forbes, mendefinisikan resesi, yakni jika selama dua kuartal berturut-turut terjadi penurunan PDB atau penurunan secara signifikan aktivitas ekonomi dan berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Indikator resesi bisa dilihat dari beberapa hal berikut ini: penurunan PDB, menurunnya pendapatan riil, jumlah lapangan kerja menurun, pengangguran bertambah, penjualan ritel merosot, dan terpuruknya industri manufaktur.

Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi (2020), menjelaskan, secara teoritis, suatu negara dikatakan resesi salah satunya karena pertumbuhan ekonomi dua kuartal berturut-turut berada pada nilai minus. Indikator lain terjadinya resesi suatu negara adalah pada inflasi dan nilai kurs.

Dampak resesi menurut Bhima Yudhistira (2020), resesi ekonomi dapat menyebabkan diserupsi ekonomi pada sektor riil atau sektor keuangan. Terjadinya resesi ekonomi ditandai munculnya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran merata pada semua sektor, seperti sektor industri manufaktur, perdagangan, properti, transportasi, dan beberapa sektor jasa-jasa lainnya. Untuk menekan biaya produksi atau beban operasional, perusahaan akan melakukan efisiensi dengan mengurangi para pekerjanya. Karena adanya PHK, pekerja kehilangan pekerjaannya, juga kehilangan pendapatannya, sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat akan menurun. Hal ini merupakan dampak lain yang dirasakan dari resesi ekonomi. Saat resesi, juga terjadi kemerosotan nilai *output* nasional dari sisi produksi barang dan jasa. Hal ini berimbas pada menurunnya nilai PDB nasional. Resesi jika tidak segera dipulihkan akan menimbulkan efek domino dalam perekonomian, karena dampaknya. Jadi resesi ekonomi lebih merata di seluruh sektor ekonomi baik sektor finansial maupun sektor riil.

Melihat indikator dampak resesi tersebut, Bima menyebut resesi bisa lebih berbahaya bagi perekonomian daripada krisis. Sebab menurut dia, proses pemulihan resesi yang diperlukan pun relatif lebih sulit. Karena krisis biasanya adalah parsial. Tahun 2008 lalu memang ada gagal bayar Bank Century, tapi saat itu UMKM masih cukup menopang ekonomi. Buktinya pertumbuhan ekonomi 2008 masih 6.1 persen. Dibandingkan saat ini, resesi ekonomi membuat sebagian besar UMKM terpukul, lebih merata, karena itu resesi bisa lebih berbahaya.

Menurut Bhima Yudhistira dari Indef, selain resesi dan krisis ekonomi, ada satu lagi konsep yang berhubungan dengan gangguan aktivitas perekonomian, yakni depresi. Depresi ekonomi tingkatannya ada di atas resesi ekonomi. Depresi ekonomi adalah resesi yang berlangsung satu tahun atau lebih. Misalnya tahun 1929-1934 itu terjadi depresi ekonomi karena resesinya panjang. Jadi fase awal masalah perekonomian bisa dimulai dari munculnya krisis, berlanjut pada resesi dan jika tidak kunjung teratasi maka bisa terjadi depresi. Berikut ini penyebab terjadinya resesi ekonomi.

- 1) Guncangan ekonomi yang tiba-tiba. Contoh guncangan ekonomi yang tiba-tiba yakni dengan munculnya kejadian pandemi Covid-19 yang tidak pernah terlintas sedikit pun dan diperkirakan sebelumnya bahwa pandemi ini terjadi begitu cepat, dan sulit menghadang penyebaran virusnya, sehingga saat ini masih terasa dampaknya dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat dunia. Pandemi Covid-19 ini telah mengguncang perekonomian di hampir seluruh sektor ekonomi secara global.
- 2) Utang yang berlebihan. Ketika orang-orang atau para pengusaha melakukan pinjaman modal melalui utang (kredit di bank), dan nilai utang tersebut sangat besar, hal ini bisa menyebabkan kredit macet, mereka bisa terjebak ke gagal bayar utang. Kredit macet atau gagal bayar bisa membuat *trade off* dalam perekonomian, perputaran aktivitas ekonomi akan mengalami *stagnan* bahkan bisa membawa kebangkrutan.
- 3) Adanya gelembung aset investasi berlebihan di pasar saham atau *real estate*. Aset investasi yang berlebihan bisa memunculkan gelembung besar, yang ketika gelembung ini meletus, bisa menyebabkan terjadi penjualan besar-besaran dan dadakan aset investasi tersebut yang dapat menghancurkan pasar dan menyebabkan resesi.
- 4) Terlalu banyak inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang secara umum dan kenaikan harga-harga tersebut dalam waktu yang cukup panjang. Dampak inflasi tidak

selamanya negatif. Dampak positif dari inflasi bisa mendorong produktifitas, jadi inflasi tidak selamanya buruk, namun inflasi yang terlalu tinggi bisa merugikan banyak pihak terutama rumah tangga konsumsi (konsumen). Untuk mengendalikan inflasi bank sentral menggunakan instrumen-instrumen seperti kebijakan suku bunga, dengan menaikkan suku bunga, akan menekan kegiatan ekonomi yang *over heat*.

- 5) Terlalu banyak deflasi. Deflasi adalah ketika harga turun dari waktu ke waktu, yang menyebabkan upah berkontraksi, yang selanjutnya menekan harga. Ketika siklus deflasi tidak terkendali, orang-orang dan bisnis berhenti belanja, yang akibatnya merongrong perekonomian. Contohnya, pada 1990-an, Jepang harus berjuang melawan deflasi yang membuatnya terpuruk dalam resesi.

Perubahan teknologi. Inovasi teknologi akan menciptakan penemuan-penemuan baru yang akan menunjang produksi sehingga produktivitas bisa meningkat. Teknologi turut membantu perekonomian dalam jangka panjang, berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang positif. Namun dengan teknologi juga bisa mengakibatkan tingkat pengangguran bertambah, karena banyak tenaga kerja manusia akan digantikan oleh mesin-mesin dan robot-robot cerdas yang bisa melakukan pekerjaan manusia. Revolusi industri membuat seluruh profesi tergusur teknologi. Pada kondisi saat ini, beberapa ekonom khawatir bahwa *Artificial Intelligence* dan robot dapat menyebabkan resesi dengan menghilangkan seluruh kategori pekerjaan

METODE PENELITIAN

Merupakan penelitian sosial empiris dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menyelidiki hubungan antara dua atau lebih gejala sosial, atau praktik-praktik sosial menyangkut individu, kelompok, masyarakat, institusi atau juga lingkungan yang lebih luas. Dalam penelitian ini gejala atau praktik sosial yang diamati adalah negara Indonesia. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah cara penelitian untuk memahami (*to understand*) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji, dengan tujuan untuk menguraikan, menjelaskan, memaparkan secara mendalam fakta yang terjadi melalui pengumpulan data sebanyak-banyaknya. Fenomena yang dikaji dalam penelitian ini adalah data-data yang dijadikan parameter dan indikator untuk menjelaskan tentang kondisi ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19 dan strategi-strategi pemulihan ekonomi yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh pemerintah.

Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada teori-teori yang terdapat dalam literatur-literatur, lebih bersifat uraian-uraian deskriptif dan naratif. Landasan teori-teori akan dijadikan panduan, apakah penelitian sudah sesuai fakta, fenomena dan data di lapangan. Lebih dari pada itu, landasan teori juga bermanfaat sebagai gambaran umum latar belakang penelitian dan menjadi bahan analisis dan pembahasan hasil penelitian. Jadi hal penting dalam penelitian kualitatif adalah data dan fakta, menggunakan teori yang ada sebagai bahan penjas, dan pada titik akhir menghasilkan suatu teori baru.

Menurut Kriyantono (2006), penelitian kualitatif bertujuan menguraikan, menjelaskan, memaparkan secara mendalam fakta yang terjadi (fenomena) melalui pengumpulan data sebanyak-banyaknya. Riset kualitatif menekankan pada keakuratan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Semakin banyak, semakin akurat dan semakin detail data yang diperoleh, maka semakin reliabel dan berkualitas hasil riset kualitatif ini. Jadi penelitian kualitatif tidak bergantung pada pengukuran secara angka (numerik) tapi lebih pada elaborasi interpretasi memaknai dari sebuah fenomena yang ada.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil publikasi lembaga-lembaga pemerintah atau instansi-instansi berwenang dan terkait dengan tema penelitian ini. Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi literatur atau studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan adalah teknik menghimpun data-data dan informasi-informasi dengan cara menelusuri dokumen-dokumen penting yang terkait dan relevan dengan objek yang diteliti.

Data-data dan informasi dapat diperoleh dari buku-buku literatur, artikel-artikel ilmiah, jurnal-jurnal penelitian, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Data dan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan bisa berupa teks akademik, foto, grafik, jurnal, *policy brief*, atau pamflet, spanduk, dan laporan jurnalistik.

Analisis Data

- 1) Reduksi data adalah mengorganisasi data, kemudian merangkum dan memilih data-data yang penting dan sesuai dengan pokok permasalahan. Reduksi data ini akan memberikan gambaran atau fakta yang terjadi, dan memiliki nilai yang holistik dan bisa menjadi pengembangan teori yang signifikan.
- 2) Penyajian data adalah kegiatan menyusun pola dari sekumpulan data dan informasi yang didapat agar bisa dibuat suatu kesimpulan. Penyajian data berupa tabel, grafik, jaringan dan bagan yang kemudian dinarasikan dalam teks-teks atau penjelasan naratif.
- 3) Verifikasi atau penarikan kesimpulan. Tahapan menjawab identifikasi masalah dalam bentuk menarik suatu kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diidentifikasi di awal berupa suatu temuan tentang gambaran objek atau deskripsi fakta yang terungkap yang sebelumnya masih belum jelas menjadi jelas dan terbukti..

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (Tidak termasuk untuk proposal)

Potret Ekonomi Indonesia Selama Pandemi Covid-19 (2020 – 2021)

Telah lebih satu tahun virus Corona Covid-19 mewabah di Indonesia, tepatnya bulan Maret 2021 sejak kasus pasien pertama yang terinfeksi diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 oleh pemerintah. Adanya Covid-19 ini menyebabkan perekonomian mengalami degradasi secara makro. Seluruh sektor usaha mengalami guncangan termasuk UMKM yang turut serta terkena imbas. Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi ((PDB) tumbuh minus dan masuk ke jurang resesi.

Beberapa indikator ekonomi makro yang terpengaruh akibat adanya pandemi Covid-19 antara lain: pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat pengangguran, pendapatan sektor pariwisata, pertumbuhan produksi industri, serta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Berikut tabel data dan grafik dampak Covid-19 selama satu tahun terakhir terhadap perekonomian Indonesia:

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi (PDB q to q) Tahun 2020 - 2021

Kuartal	Tahun 2020 (Dalam Persen)	Tahun 2021 (Dalam Persen)
Q1	-2,41	-0,96
Q2	-4,19	-
Q3	5,05	-
Q4	-0,42	-

Sumber data: Statistics Indonesia; <https://id.tradingeconomics.com>

Secara Q-to-Q (antar kuartal) pertumbuhan ekonomi di kuartal ke IV mengalami penurunan pada angka -0,42% dibanding kuartal ke III 2020 yang sebelumnya naik 5,05%. Pada kuartal III, ada indikasi perekonomian mulai tumbuh kembali setelah dibukanya aktivitas ekonomi dengan diberlakukannya “*New Normal*”. Namun pola pemulihan ekonomi kembali turun pada kuartal ke IV. Indonesia masih belum bisa lepas dari resesi, di mana pada kuartal I dan II pertumbuhan ekonomi juga mengalami minus.

Ada beberapa hal yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV tahun 2020 mengalami minus. Mengutip pendapat pengamat ekonomi dari *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara, pada <https://nasional.kontan.co.id/> tanggal 5 Februari 2021, dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal ke IV tahun 2020 minus 0,42 (q to q), minus 2,19% (yoy) atau minus 2,07% (*full year*) menunjukkan 2 (dua) hal, yaitu: Pertama, pemerintah masih belum mampu mengendalikan pandemi secara tepat dan sistematis, dunia usaha masih stagnan dan 83% pengeluaran dari total konsumsi nasional yang diwakili oleh kelompok masyarakat berpengeluaran menengah dan atas, mereka masih terkesan menahan diri untuk berbelanja.

Kedua, kebijakan *New Normal* yang terkesan dipaksakan oleh pemerintah sehingga menjadi blunder bagi pemerintah sendiri. Masyarakat didorong untuk tetap beraktivitas seperti biasa namun dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tetap diberlakukan, sehingga operasional berbagai usaha dan industri dibatasi. Kebijakan ini dianggap kebijakan yang abnormal dan terkesan maju mundur. Langkah ini membuat keraguan dunia industri dan usaha, karena kepercayaan konsumen jadi turun. Artinya vaksinasi massal dilakukan, *new normal* telah diterapkan, dari 3M menjadi 7M juga telah disosialisasikan secara menyeluruh ke masyarakat, namun kenapa masih harus diberlakukan PPKM (istilah terbaru pengganti PSBB), kenapa masih banyak yang terinfeksi bahkan kasus harian masih tinggi? Ini lah yang menjadi ketidakpercayaan konsumen terhadap pasar, sehingga permintaan pasar cenderung menurun.

Pendapat lain apa yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 mengalami minus, pada <https://cnnindonesia.com/> Kepala BPS Suhariyanto mengatakan bahwa dampak Covid-19 dirasakan hampir seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Terjadi kontraksi ekonomi pada beberapa negara yang menjadi mitra dagang Indonesia. Negara-negara ini pun turut mengalami hal yang sama pada perekonomian negaranya pada kuartal IV 2020. Singapura minus 3,8%, Hongkong minus 3%, Korea Selatan minus 1,4%, Amerika Serikat (AS) minus 2,5%, dan Uni Eropa mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus 4,8%

Suhariyanto menjelaskan seluruh sektor ekonomi (komponen) tumbuh negatif kecuali konsumsi pemerintah, namun pertumbuhannya juga mengalami perlambatan yang disebabkan perlambatan pertumbuhan belanja pegawai pada 2020. Pada tahun 2019 belanja pegawai tumbuh 8,49%, tetapi pada tahun 2020 hanya 1,18% pertumbuhannya.

Kontraksi ekonomi terdapat terjadi pada investasi, yakni minus 1,63%. Menyusul konsumsi rumah tangga yang berkontraksi sebesar minus 1,43%. Sektor lapangan usaha, 10 dari 17 sektor ekonomi menyumbang kontribusi negatif. Transportasi dan perdagangan tercatat menjadi kontraksi paling parah sebesar minus 15,04%. Lalu sektor akomodasi dan makan yang minus 10,22% akibat dari turunnya tingkat hunian hotel, berkurangnya kunjungan wisatawan mancanegara karena ditutupnya tempat-tempat wisata, tempat-tempat hiburan, sejumlah hotel dan restoran yang gulung tikar selama pandemi covid-19.

Tabel 2. Tingkat Inflasi Bulanan, IHK dan IHP Tahun 2020 – 2021

Bulan	Inflasi (Dalam Persen)	IHK	IHP
Mei 2020	0,07	104,87	103,37
Juni 2020	0,18	105,06	103,54
Juli 2020	-0,1	104,95	103,45
Agustus 2020	-0,05	104,09	103,38
September 2020	-0,05	104,85	103,36
Oktober 2020	0,07	104,92	103,57
November 2020	0,28	105,21	104,06
Desember 2020	0,45	105,68	104,62
Januari 2021	0,26	105,95	105,20
Februari 2021	0,10	106,06	105,40
Maret 2021	0,08	106,15	105,53
April 2021	0,13	106,29	105,56
Mei 2021	0,32	106,53	106,20
Juni 2021	-0,16	106,46	106,16

Sumber data: Statistics Indonesia; <https://id.tradingeconomics.com>

Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa inflasi sepanjang tahun 2020 menjadi inflasi terendah sejak tahun 2014 lalu atau selama enam tahun terakhir. Dikatakan oleh Setianto (Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS), bahwa terjadinya pelemahan inflasi karena daya beli masyarakat yang menurun selama pandemi Covid-19 ini. Daya beli yang menurun diakibatkan tutupnya beberapa industri dan usaha yang menjadi sumber pendapatan mereka. Ada yang mengalami PHK karena perusahaan tempat bekerja mengalami kebangkrutan dan ditutup akibat pandemi Covid-19. Ada yang usahanya gulung tikar, ada yang mengalami pengurangan karyawan, ada yang dirumahkan, sehingga sumber pendapatan mereka terhenti dan dampaknya pada daya beli yang menurun. (<https://liputan6.com>)

Inflasi yang terlalu rendah dampaknya pada sisi supply, akan menurunkan jumlah penawaran barang dan melemahkan produktivitas produsen. Tidak ada stimulus bagi produsen untuk memproduksi. Stimulus yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengontrol inflasi agar berada pada titik yang wajar untuk menstimulasi perekonomian di antaranya; bantuan sosial, BLT, subsidi, kartu prakerja, subsidi gaji dan bantuan-bantuan sosial tunai lainnya.

Gambar 1. Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD per 8 Juli 2021

Sumber data: Statistics Indonesia; <https://id.tradingeconomics.com>

Sepanjang semester I tahun 2020, nilai tukar rupiah bergerak sangat fluktuatif dan terjadi depresiasi. Nilai tukar rupiah terhadap USD bulan Januari dan Februari 2020 pada level sebesar Rp 13.732,- dan Rp 13.776,- per USD, namun seiring datangnya badai Covid-19 di Indonesia awal Maret 2020 dan meluas di seluruh dunia, nilai tukar rupiah mulai mengalami pelemahan. Hal ini akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan para investor lebih memilih dana investasinya ke aset-aset yang memiliki nilai resiko lebih aman, karena pandemi ini membuat meningkatnya risiko ketidakpastian global. Aset-aset yang sifatnya *safe haven asset* seperti; investasi emas, mata uang dunia, obligasi pemerintah, mengakibatkan terjadinya *capital outflow* atau keluarnya arus modal dari negara-negara *emerging market*, termasuk Indonesia, dan menyebabkan hampir seluruh mata uang dunia terhadap USD mengalami depresiasi.

Indonesia dengan kondisi tersebut pada Maret 2020 menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh hingga melebihi Rp 16.000,- per USD dan secara bulanan terdepresiasi hingga mencapai Rp 15.195,- per USD, dan terus berlanjut hingga awal April 2020 dimana nilai tukar rupiah mencapai level terendahnya dalam sejarah pada Rp 16.741- per USD.

Upaya yang perlu dilakukan pemerintah melalui Bank Indonesia agar nilai kurs rupiah tidak terus menerus mengalami pelemahan adalah dengan serangkaian bauran kebijakan yang harus segera direalisasikan. Pengambilan keputusan yang lamban akan berdampak panjang pada perekonomian secara makro. Jika pemerintah mampu membawa pertumbuhan ekonomi dan defisit fiskal bisa di bawah 3 % maka diprediksi investor akan berbondong-bondong menanamkan investasinya di Indonesia. Resiko yang akan dihadapi dalam perekonomian global pasca pandemi Covid-19 usai adalah utang negara itu sendiri. Karena itu pertumbuhan ekonomi yang positif dan cepat akan mendukung rupiah stabil kembali.

Salah satu kebijakan mengatasi rendahnya nilai kurs rupiah pemerintah mengeluarkan Perpu No. 1 tahun 2020 tentang “Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan” sehingga nilai tukar rupiah awalnya di atas Rp. 16.000,- menjadi di bawah Rp. 16.000,- per USD. Dengan kebijakan ini membuat di akhir bulan Desember 2020 terjadi penguatan nilai tukar rupiah menjadi Rp.14.105,- per USD

Gambar 2. Indeks Harga Saham Gabungan BEI per Juli 2021



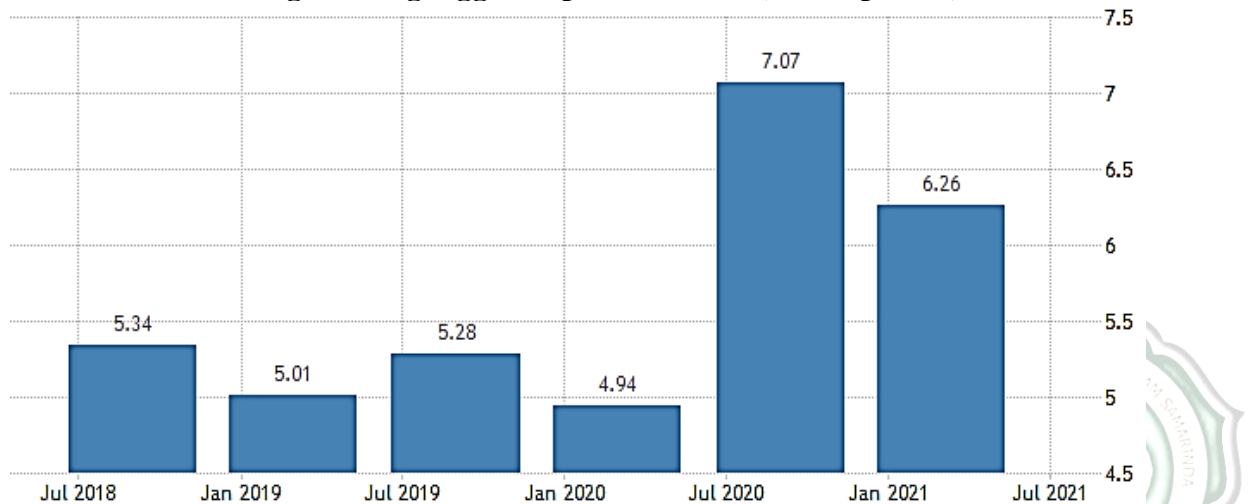
Sumber data: Statistics Indonesia; <https://id.tradingeconomics.com>

Semenjak pandemi pada Maret 2020, Index Harga Saham Gabungan (IHSG) pada kisaran level 5.942. Paling tajam terjadi penurunan pada bulan April, sepanjang tahun indeks berada

pada level terendah 3.937. Bulan Mei 2020, terjadi *recovery* di mana indeks mulai menapaki level 4.605, hingga pergerakan pada bulan Juni yang menyentuh level 4.940. Pada Juli hingga awal Agustus 2020 kenaikan indeks tidak terlalu signifikan.

Pasar yang mengalami volatile, membuat Bursa Efek Indonesia (BEI) memberlakukan beberapa kebijakan guna mengatasi pelemahan indeks yang semakin terpuruk agar kembali bangkit dan stabil, seperti: kebijakan *trading halt*, *auto rejection* bawah, serta pencabutan daftar *efek short selling*. Di sisi lain turut serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan izin aksi korporasi semua emiten atau perusahaan publik untuk melakukan pembelian kembali (*buyback*) saham tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS).

Gambar 3. Tingkat Pengangguran per Juni 2021 (dalam persen)



Sumber data: Statistics Indonesia; <https://id.tradingeconomics.com>

Dilaporkan oleh *Center of Reform on Economics* (CORE) bahwa selama pandemi Covid-19 tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, terlebih pada bulan Juli 2020. Dipaparkan oleh Ekonom CORE Mohammad Faisal bahwa peningkatan persentase pengangguran terbuka lebih signifikan pada tingkat kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat pengangguran terbuka pada tahun 2020 meningkat sebesar 2,22% atau sekitar 3 juta, dan hal ini lebih tinggi dari tingkat kemiskinan yang naik sebesar 0,41% (1,13 juta). Menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan masih bisa diredam karena banyaknya bantuan-bantuan sosial dan program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Sedangkan untuk pengangguran, tidak semudah itu mengatasinya, karena pengangguran hanya bisa teratasi setidaknya secara statistik dengan menciptakan lapangan kerja. Demikian penjelasan Muhammad Faisal dalam diskusi virtual yang dilaporkan pada www.ekonomi.bisnis.com, Senin (3/5/2021).

Ditambahkan lagi penyebab lain, semakin banyaknya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan selama pandemi disebabkan oleh tingginya gelombang PHK yang akhirnya mengakibatkan pergeseran pekerjaan dari sektor formal ke informal. Dari data BPS tercatat sektor informal mengalami kenaikan 3% artinya jika dikalikan 3% ini dengan jumlah angkatan kerja ada kurang lebih sekitar 130an juta orang yang bergeser dari sektor formal ke sektor informal. Di awal-awal pandemi, persentase sektor informal sudah melebihi sektor formal sebesar 57%.

Tabel 4. Pendapatan Sektor Pariwisata Per Triwulan Tahun 2018 – 2021

Periode	Pendapatan Pariwisata (Dalam Juta USD)
Juli – Desember 2018	4.647,48
Januari – Maret 2019	4.197,39
April – Juni 2019	4.058,78
Juli – September 2019	3.649,24
Oktober – Desember 2019	4.722,71
Januari – Maret 2020	4.481,34
April – Juni 2020	2.911,28
Juli – September 2020	88,43
Oktober – Desember 2020	97,59
Januarai – Maret 2021	147,36
April – Juni 2021	88,56

Sumber data: Statistics Indonesia; <https://id.tradingeconomics.com>

Pariwisata Indonesia merupakan salah satu sektor yang paling merasakan imbas akibat pandemi Covid-19 yang menghantam dunia. Pandemi menyebabkan ditutupnya objek-objek wisata, dan berdampak pada tingkat kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Selama ini sektor pariwisata memberi kontribusi besar terhadap PDB, yakni 5,5% dari total PDB yang Rp. 280 triliun, dan juga mampu menyerap 12,7 juta orang angkatan kerja (10%). Pendapatan sektor pariwisata mengalami penurunan Rp 59,1 triliun hingga Rp 86 triliun.

Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19

Bukan hanya krisis kesehatan dampak dari pandemi Covid-19, namun berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan negara di mana berbagai aktivitas ekonomi dalam negeri mengalami degradasi. Pertumbuhan ekonomi nasional melambat, penerimaan negara defisit, naiknya pembiayaan dan belanja negara. Dalam rangka penyelamatan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional, serta mengembalikan stabilitas sistem keuangan negara, pemerintah telah menyusun strategi kebijakan dan mengambil langkah-langkah cepat melalui berbagai kebijakan relaksasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan pembiayaan dan belanja untuk kesehatan dan alokasi anggaran untuk pemulihan perekonomian.

Dilansir dari www.dkjn.kemenkeu.go.id program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diharapkan pelan-pelan roda perekonomian mulai berputar dan adanya pertumbuhan ekonomi. PEN ditunjukkan untuk memulihkan perekonomian nasional secara komprehensif dan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Dimulai dari yang paling rentan dan urgen yaitu rumah tangga masyarakat, kemudian UMKM.

Menurut Kementerian Keuangan strategi yang dilakukan dalam pemulihan ekonomi nasional yakni dengan memperkuat ekonomi dalam negeri (domestik) melalui belanja pemerintah pusat/daerah, stimulus/insentif atau subsidi bagi dunia usaha dan UMKM, alokasi dana untuk pemulihan kesehatan, bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin dan kurang mampu (bantuan sosial, perlindungan sosial), pembiayaan korporasi dalam bentuk dukungan finansial bagi perusahaan terdampak pandemi ini.

Prinsip transparansi, akurasi dan akselerasi dalam implementasi paket kebijakan PEN harus diutamakan. Di satu sisi, agar dampak tingkat kecepatan penyerapan anggaran PEN ini segera mungkin bisa dirasakan oleh masyarakat perlu dilakukan dengan sesegera mungkin. Di sisi lain, untuk menghindari permasalahan pertanggungjawaban pengalokasian dan penggunaan dana PEN, maka proses eksekusi harus dilakukan secara efektif, efisien, tepat dan akurat. Serapan

anggaran PEN masih di bawah 30% per Agustus 2020, dari total anggaran mencapai Rp.695,2 triliun

Bank Indonesia sebagai institusi yang berwenang menjaga stabilitas keuangan negara dan nilai tukar rupiah, dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, dilansir dari www.CNNIndonesia.com, Menurut Gubernur BI, Perry Wijayanto, mengatakan bahwa ada 5 (lima) kebijakan yang akan dapat cepat memulihkan perekonomian nasional dari dampak pandemi Covid-19. Kebijakan ini untuk memperkuat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yaitu:

- 1) Sektor-sektor produktif dibuka kembali guna menggerakkan roda ekonomi. Namun pembukaan sektor ekonomi tersebut harus disertai disiplin penerapan protokol kesehatan dan diimbangi dengan pengembangan vaksin Covid-19. Disiplin prokes dan vaksin sangat penting agar mobilitas dan roda ekonomi kembali normal, kesehatan terjaga, dan dampak krisis sektor keuangan dan moneter dapat dicegah.
- 2) Realisasi stimulus fiskal senilai Rp. 695,2 triliun yang digelontarkan pemerintah per 25 November 2020 lalu, serapannya sebesar Rp 431,54 triliun atau setara dengan 62,1% dari pagu.
- 3) Penurunan suku bunga kredit oleh perbankan karena Bank Indonesia telah memangkas suku bunga acuan sebesar 3,57%.
- 4) Stimulus moneter dan makroprudensial; antara lain pelonggaran moneter lewat instrumen kuantitas atau *quantitative easing* (QE) dengan suntikan dana dan berbagai beban (*burden sharing*) dengan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dana penanganan Covid-19.
- 5) Digitalisasi ekonomi dan keuangan.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menyampaikan bahwa Covid-19 belum selesai, pandemi masih dirasakan seluruh dunia, khususnya Indonesia, maka ada 3 (tiga) hal yang disebut sebagai *game changer* guna menangani pandemi tersebut. *Pertama* yaitu pemerintah turut ikut campur atau melakukan atau intervensi bidang kesehatan, termasuk program vaksinasi massal. *Kedua*, agar masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat miskin bisa tetap *survive* di tengah gejolak perekonomian, melalui bantuan-bantuan sosial dan program-program perlindungan sosial. Memberikan subsidi bunga, penangguhan kredit, penjaminan, alokasidana usaha kepada pelaku usaha/dunia usaha termasuk dukungan juga pada BUMN yang memerlukan. *Ketiga*, melakukan reformasi, termasuk di dalamnya UU Cipta Kerja, reformasi administrasi dan birokrasi, reformasi bidang pendidikan, reformasi kesehatan, dan lain-lain, dengan tujuan agar pemulihan ekonomi dapat terlaksana dengan cepat, sehingga mendorong kemudahan berusaha, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan investasi.

Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Pemerintah telah mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp 695,2 triliun pada tahun 2020. Diharapkan pada triwulan III pemulihan ekonomi nasional bisa dirasakan meskipun belum bertumbuh positif, namun setidaknya tidak berkontraksi sebesar triwulan II. Lalu ekonomi nasional diharapkan kembali bisa bertumbuh positif kembali pada triwulan IV.

Untuk tahun 2021, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mematok pagu anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 699,43 triliun. Diharapkan ekonomi nasional akan mengalami pemulihan (*recovery*) yang signifikan. Oleh karena itu, agar harapan tersebut dapat terwujud harus ada sinergi antara pemegang kebijakan fiskal dan moneter serta institusi-

institusi terkait dan dilaksanakan secara komprehensif. Terdapat 3 (tiga) kebijakan yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut, yaitu:

- 1) Peningkatan konsumsi dalam negeri,
- 2) Peningkatan aktivitas dunia usaha, serta
- 3) Menjaga stabilitasi ekonomi dan ekspansi moneter.

Konsumsi dalam negeri adalah penggerak ekonomi nasional. Semakin tinggi tingkat konsumsi maka pergerakan ekonomi akan semakin baik. Tingkat konsumsi menggambarkan tingkat atau kemampuan daya beli masyarakat. Karena itu untuk mendorong kemampuan konsumsi (daya beli) masyarakat, pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar Rp172,1 triliun. Alokasi dana ini disalurkan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Pra Kerja, subsidi listrik dan lain-lain. Konsumsi lembaga-lembaga kementerian atau pun lembaga pemerintah daerah juga didorong melalui percepatan realisasi APBN/APBD. Konsumsi diarahkan untuk produk dalam negeri agar memberikan multiplier effects yang signifikan.

Pemberian insentif sebagai stimulus kepada UMKM dan korporasi yang diberikan oleh Pemerintah agar dunia usaha kembali bergerak. Bentuk stimulus yang diberikan kepada UMKM, antara lain berupa subsidi bunga melalui Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro, penundaan pembayaran angsuran kredit/utang, penjaminan modal kerja sampai Rp10 miliar, subsidi bunga kredit perbankan, dan insentif pajak. Untuk korporasi, Pemerintah memberikan insentif pajak antara lain bebas PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pengembalian pendahuluan PPN; menempatkan dana Pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur. Pemerintah juga memberikan penjaminan modal kerja untuk korporasi yang strategis, prioritas atau padat karya. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian surat berharga negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Tujuan penurunan suku bunga adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha.

Pada acara *National Economic Talk Show 2021* (NETO 2021) yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Ilmu Ekonomi (IMIE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dengan menghadirkan seorang Guru Besar bidang Ilmu Ekonomi Prof. Daniel Daud Kameo, S.E., M.A., Ph.D. Disampaikan 4 (empat) hal penting tentang kebijakan pemulihan ekonomi makro Indonesia; yakni:

- 1) Kondisi makroekonomi Indonesia.

Makroekonomi Indonesia kuartal I tahun 2021 mengalami pertumbuhan yang minus. Namun, dilihat dari tren terutama pada 6 (enam) sektor unggulan secara keseluruhan membaik dari tahun sebelumnya, dan terus bertumbuh positif.

- 2) Kebijakan pemulihan ekonomi.

Pengalokasian anggaran untuk program PEN karena adanya pandemi Covid-19. Anggaran ini berupa dana bantuan sosial kepada masyarakat, sebagai bantuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar bisa tetap survive karena pandemi.

- 3) Kesempatan kerja, kemiskinan, dan tingkat kesejahteraan.

Selain untuk meningkatkan daya beli masyarakat, dana bantuan sosial yang diberikan pemerintah diharapkan bisa mengurangi angka kemiskinan.

- 4) Basis ekonomi Indonesia dan peluang bagi generasi milenial.

Generasi milenial diharapkan perannya untuk pertumbuhan teknologi dan ekonomi Indonesia di masa depan.

Universitas Indonesia (UI) merekomendasikan sembilan poin utama yang tercantum dalam salah satu butir *policy brief* terkait strategi pemulihan ekonomi Indonesia. Berikut sembilan

rekomendasi kebijakan yang disampaikan Ari Kuncoro Rektor UI kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, di kantor Kemenko Perekonomian, Senin, 7 Juni 2021:

- 1) Untuk menjaga harmonisasi kebijakan perlu ditingkatkan sinkronisasi dan koordinasi antar lembaga kebijakan baik sektor moneter, keuangan, dan fiskal.
- 2) Untuk menjaga stabilitas indikator makroekonomi, mempertahankan kredibilitas dan menjaga sentimen pasar yang positif, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam investasi publik jangka panjang sekaligus memperhatikan kesinambungan fiskal jangka panjang..
- 3) Mempermudah akses dana PEN namun tetap mengedepankan aspek-aspek *good governance* agar tercipta transparansi dan akuntabilitas guna menghindari kesalahan pertanggungjawaban dan keakuan prosedur agar dana PEN optimal terserap.
- 4) Program PEN didesain sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik, salah satunya dengan melakukan restrukturisasi kredit serta kemudahan pembiayaan serta fleksibilitas program pembiayaan bagi UMKM.
- 5) Digitalisasi ekosistem. Terbatasnya mobilitas akibat pandemi pelaku UMKM harus melek teknologi dan beradaptasi dengan ekonomi digital. Diversifikasi produk jasa keuangan berbasis teknologi digital sangat perlu dilakukan.
- 6) Pembinaan dan pendampingan usaha bagi UMKM, untuk mendukung literasi teknologi bagi UMKM, sehingga UMKM mampu menghasilkan dan mengembangkan produk-produk unggulan.
- 7) Pemulihan sektor pariwisata secara bertahap secara kewilayahan berdasarkan analisis big data serta memfokuskan pada wisatawan nusantara. Adaptasi di destinasi wisata terhadap kondisi pandemi juga perlu dilakukan. Sehingga kolaborasi dengan berbagai pihak baik pemerintah daerah, pusat maupun pihak lain yang terkait menjadi mutlak diperlukan dalam rangka mendorong geliat pariwisata dan ekonomi kreatif.
- 8) Penguatan sistem jaminan sosial bagi masyarakat melalui perluasan cakupan penerima bantuan sosial dengan jalan memperbaharui data penerima jaminan sosial sampai dengan kelompok 60 persen terbawah Selain itu, program jaminan/bantuan sosial harus bersifat adaptif dalam merespons perubahan yang terjadi di masyarakat dengan jalan on demand application system yaitu masyarakat secara mandiri dapat melapor jika memerlukan bantuan sosial.³
- 9) Fleksibilitas penggunaan dana desa perlu diperpanjang hingga setidaknya pada 2022. Dalam masa pandemi, dana desa berfungsi untuk membantu memulihkan perekonomian masyarakat desa. Untuk menjaga akuntabilitasnya, monitoring berkala dan pengawasan penggunaan dana desa secara transparan harus menjadi prioritas yang harus dilakukan.

SIMPULAN

Pandemi Covid-19 berdampak pada krisis kesehatan dan juga krisis ekonomi. Memburuknya sistem keuangan negara, berbagai aktivitas ekonomi dalam negeri mengalami degradasi. Pertumbuhan ekonomi nasional melambat, penerimaan negara defisit, naiknya pembiayaan dan belanja negara. Dalam rangka penyelamatan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional, serta mengembalikan stabilitas sistem keuangan negara, pemerintah telah menyusun strategi kebijakan dan mengambil langkah-langkah cepat melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui berbagai kebijakan relaksasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan pembiayaan dan belanja untuk kesehatan dan alokasi anggaran untuk pemulihan perekonomian.

Pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp 695,2 triliun pada tahun 2020. Diharapkan pada triwulan III pemulihan ekonomi nasional bisa dirasakan meskipun belum bertumbuh positif, namun setidaknya tidak berkontraksi sebesar triwulan II. Lalu ekonomi nasional diharapkan kembali bisa bertumbuh positif kembali pada triwulan IV.

Tahun 2021, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mematok pagu anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 699,43 triliun. Diharapkan ekonomi nasional akan mengalami pemulihan (recovery) yang signifikan. Oleh karena itu, agar harapan tersebut dapat terwujud harus ada sinergi antara pemegang kebijakan fiskal dan moneter serta institusi-institusi terkait dan dilaksanakan secara komprehensif. Terdapat 3 (tiga) kebijakan yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut, yaitu: peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitasi ekonomi dan ekspansi moneter.

REFERENSI

- Aida, Nur Rohmi. (2020, Desember). Refleksi Perekonomian Indonesia 2020 dan Harapan pada 2021. Kompas.com. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/19/180200765/refleksi-perekonomian-indonesia-2020-dan-harapan-pada-2021-?page=all>
- Aida, Nur Rohmi. (2020, Desember). Kaleidoskop 2020: Babak Belur Ekonomi Dunia dan Upaya Tetap Bertahan. Kompas.com. Diakses dari: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/17/195700365/kaleidoskop-2020--babak-belur-ekonomi-dunia-dan-upaya-tetap-bertahan>.
- Azanella, Luthfia Ayu. (2020, November). Indonesia Resmi Resesi, Ini Bedanya dengan Krisis dan Depresi Ekonomi. Kompas.com. Diakses dari: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/06/162000865/indonesia-resmi-resesi-ini-bedanya-dengan-krisis-dan-depresi-ekonomi>.
Editor : Rizal Setyo Nugroho
- Fahrika, A. Ika dan Roy, Juliansyah. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perkembangan Makro Ekonomi di Indonesia dan Respon Kebijakan yang Ditempuh. Jurnal Inovasi Vol 16. Diakses di <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/8255>
- Nugroho, Agus Eko. (2020, Agustus). Survei Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Ekonomi Rumah Tangga Indonesia. LIPI. Diakses dari <http://lipi.go.id/siaranpress/survei-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomi-rumah-tangga-indonesia/22123>
- Purwanto, Antonius. (2021, Januari). Ekonomi Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19; Potret dan Strategi Pemulihan. Kompaspedia. Diakses dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/ekonomi-indonesia-pada-masa-pandemi-covid-19-potret-dan-strategi-pemulihan-2020-2021>
- Ratriani, Virdita. (2020, November). Apa Itu Resesi Ekonomi dan Dampaknya Yang Resmi Dialami Indonesia?. Kontan.co.id. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/apa-itu-resesi-ekonomi-dan-dampaknya-yang-resmi-dialami-indonesia#:~:text=Dikutip%20dari%20Forbes%2C%202015%20Juli,bulan%20atau%20bahkan%20bertahun%2Dtahun>.

Yamalis, Fakhrol Rozi dan Putri, Ririn Noviyanti. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*. Vol. 4. 384-388. Diakses di <http://ekonomis.unbari.ac.id>

Zuraya, Nidia. (2020, Juli). Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 bagi Ekonomi RI. *Republika*. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid19-bagi-ekonomi-ri>

